



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : KEBIJAKAN LALU LINTAS: Organda Dukung Perluasan Ganjil Genap
Tanggal : Jumat, 28 September 2018
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 29

JAKARTA — Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendukung rencana Kementerian Perhubungan untuk memperluas kebijakan ganjil genap di beberapa kota besar lain di Tanah Air. Dewi A. Zuhriyah dewi.zuhriyah@bisnis.com Ateng Aryono, Sekjend Organda, menilai dengan adanya kebijakan tersebut akan berdampak positif baik dari sisi minimnya gas buang, kecepatan kendaraan, serta cukup menguntungkan bagi angkutan umum berplat kuning. "Travel time jadi lebih visible sehingga angkutan kami yang biasanya 1,5 trip atau 2 trip karena ada kebijakan itu bisa lebih," kata Ateng, Kamis (27/9). Dalam hal ini, Ateng juga tak menampik kebijakan ganjil genap juga berdampak positif bagi pendapatan perusahaan transportasi umum khususnya yang berplat kuning. "Efek ke income juga." Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) juga tidak merasa keberatan jika Kementerian Perhubungan berencana untuk memperluas paket kebijakan lalu lintas seperti kebijakan ganjil genap dan pembatasan jam operasional angkutan barang di sejumlah kota besar. Wakil Ketua Aprindo Kyatmaja Lookman mengatakan, sebetulnya pembatasan truk di kota-kota besar selain Jabodetabek urgen sehingga jika pemerintah mengatur, hal itu tidak akan berdampak pada proses logistik. "Di kota-kota lain volumenya enggak begitu [besar]. Kami juga enggak lewat dalam kota. Biasa di bypass dan pinggiran," kata Kyatmaja beberapa waktu lalu. Kementerian Perhubungan sebelumnya mengusulkan untuk memperluas paket kebijakan rekayasa lalu lintas pembatasan mobil pribadi dengan skema ganjil genap seperti di sejumlah kota besar seperti Surabaya, Bandung dan Medan. Usulan tersebut dilatarbelakangi dari sisi efektivitas, hemat energi, dan target agar masyarakat kembali menggunakan angkutan umum. "Kalau kita lihat tingkat kemacetan di beberapa kota besar mulai tinggi akibat banyaknya masyarakat menggunakan mobil pribadi. Makanya, kami mulai tawarkan ke beberapa Provinsi, nah nanti saya mau undang para kepala daerah untuk dengar keberhasilan dari Jakarta," kata Budi kepada Bisnis, Rabu (19/9). Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan pihaknya sudah mengundang beberapa kepala daerah untuk mendengar cerita sukses terkait dengan kebijakan ganjil genap yang diterapkan di DKI Jakarta selama penyelenggaraan Asian Games 2018. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada para kepala daerah apakah akan meniru kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Jakarta atau tidak. "Jadi, nanti mereka akan konsultasikan dulu dengan dishub setempat," kata Budi. Selain ganjil genap, Budi mengatakan kebijakan tersebut juga akan melingkup pembatasan jam operasional angkutan barang atau truk. Kendati demikian, dia menyanggupi untuk membantu mencari solusi sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Adapun, rencana perluasan kebijakan rekayasa lalu lintas itu akan dibahas usai Asian Para Games 2018. Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) mengaku keberatan dengan rencana tersebut. Ketua Asperindo M. Feriadi meminta agar pemerintah mengkaji kembali rencana penerapan paket kebijakan lalu lintas seperti ganjil genap di beberapa kota besar selain Jabodetabek. Pasalnya, penerapan kebijakan itu bisa berdampak pada kelancaran pengiriman barang yang dilakukan oleh jasa kurir. "Pastinya untuk pick up dan delivery akan terganggu," kata Feriadi. Apalagi, tagline yang ditonjolkan oleh jasa kurir adalah pengiriman yang cepat sehingga jika ada aturan itu, proses pengiriman cenderung lebih lama. Menurutnya, pemerintah harus membuat kajian lebih mendalam tentang rencana tersebut, mengingat saat ini pemerintah juga ingin membangun perekonomian melalui usaha kecil dan menengah (UKM) yang banyak tersebar di daerah. "Hal ini bisa memperlambat kemajuan UKM dan menurunkan daya saing di bidang pendistribusian barang," katanya.

PENERAPAN DI BALI Dalam perkembangan lain, Kementerian Perhubungan akan menerapkan kebijakan pembatasan mobil pribadi dengan skema ganjil genap untuk lima ruas jalan di Bali seiring dengan digelarnya Annual Meeting International Monetary Fund World Bank (IMF-WB). Selain ganjil genap, Kemenhub juga memberlakukan pembatasan operasional mobil barang guna mendukung kelancaran lalu lintas selama kegiatan tersebut berlangsung. Adapun, lima ruas jalan tersebut yaitu Jl. By pass Ngurah Rai (Simp. PesanggrahanNusa Dua), Jl. Raya Uluwatu (Simp. Kali-Uluwatu Arah Nusa Dua), Jl. Kampus UNUD (Simp. Kampus-Politeknik arah Nusa Dua) dan Jl. Uluwatu II (Simp. Bali-Simp. Kampus UNUD Ngurah Rai arah Nusa Dua), serta Jl. Siligita (Simp. PDAM-Simp. By pass Ngurah Rai arah Nusa Dua). "Rencana ini sudah kita rapatkan di Bali dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Perhubungan setempat, kemudian Kepolisian dalam hal ini Polda Bali juga sudah menyetujui itu semuanya," ujar Budi. Dia mengatakan, setelah ini akan disiapkan aspek legalitas berupa Peraturan Menteri Perhubungan, sosialisasi bersifat edukasi, dan penyiapan rambu-rambu lalu lintas termasuk leaflet, booklet, dan spanduk. "Sudah kami siapkan konsep regulasinya di mana dalam pekan ini kita harapkan sudah selesai dan pekan depan kami langsung laksanakan sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya. Adapun, waktu pemberlakuan kebijakan pengaturan ganjil genap dan pembatasan operasional mobil barang akan dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 7 sampai dengan 16 Oktober 2018 dengan jam operasional pagi pukul 06.00-09.00 WITA dan sore pukul 15.00- 19.00 WITA. Beberapa kendaraan yang dikecualikan dari kebijakan ini antara lain kendaraan roda dua, kendaraan dinas, ambulans, mobil derek, dan kendaraan delegasi berstiker. Adapun, pembatasan operasional mobil barang diperuntukan bagi kendaraan mobil barang pengangkut bahan bangunan (tanah, pasir, batu, dan besi).